

Pendekatan Responsif Gender Dalam Penyediaan Sarana Lingkungan Perkotaan

Gender Responsive Approach in Urban Infrastructure Provision

Landung Esariti¹

Laboratorium Manajemen Kota, Departemen PWK FT UNDIP, Semarang, Indonesia

Diah Intan Kusumo Dewi²

Laboratorium Perancangan Ruang Fisik Wilayah dan Kota, Departemen PWK FT UNDIP, Semarang, Indonesia

Abstrak: Peran perencana kota dalam penyediaan infrastruktur perkotaan adalah perlunya memahami penyediaan infrastruktur berdasarkan kebutuhan penggunaannya. Disinilah, pendekatan responsif gender menjadi penting karena pendekatan ini menekankan pada upaya untuk mengetahui bagaimana keadilan dapat diterapkan dengan menemukenali relasi gender yang membentuk sistem aktivitas, yang diamati pada semua kelompok masyarakat pengguna infrastruktur perkotaan. Artikel ini ditulis dengan membandingkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 534/KPTS/M/2001 Tanggal: 18 Desember 2001 tentang jenis sarana lingkungan perkotaan dan observasi yang dilakukan di sekitar Kecamatan Tembalang, Semarang. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada penyediaan sarana lingkungan perkotaan yang terdiri dari sarana niaga, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pelayanan umum, sarana sosial budaya dan ruang terbuka hijau dapat diketahui beberapa indikator pelayanan yang harus dipenuhi. Indikator yang dimaksud adalah jangkauan pelayanan, pengguna usia produktif dan tidak produktif, tata guna lahan eksisting dan rencana, dan kondisi sistem social masyarakat.

Kata kunci: *Penyediaan Sarana Lingkungan Perkotaan; Responsif Gender.*

Abstract: The role of urban planners in the provision of urban infrastructure is to understand that the provision of infrastructure based on the needs assessment of its users. Here, gender-responsive approach is important because this approach emphasizes the effort to know how justice can be applied to identify gender relationships which perform the activities between users. This article was written by comparing the Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure No. 534 / KPTS / M / 2001 Date: December 18, 2001 about the type of urban environmental facilities and observations made around Tembalang District, Semarang. Based on observations conducted towards the provision of urban environment consisting of commercial facilities, education facilities, health facilities, public service facilities, social and cultural facilities and green open spaces, essential indicators was identified. The indicators are: outreach, age categories between productive and unproductive users, the existing and plan of land use, and the condition of social system.

Keywords: *The Provision of Urban Environment; Gender Responsive.*

¹ Landung Esariti: Lab. Manajemen Kota, Departemen PWK FT UNDIP, Semarang, Indonesia
Email: adoeng@gmail.com

² Diah Intan Kusumo Dewi: Lab. Perancangan Ruang Fisik Wilayah dan Kota, Departemen PWK FT UNDIP, Semarang, Indonesia
Email: diah.intan@gmail.com

Pendahuluan

Gender penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam perencanaan kota dan wilayah, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No.9 / 2000 yang mewajibkan lembaga pemerintah di semua tingkatan untuk melakukan pengarusutamaan gender, yaitu menempatkan gender sebagai salah satu dasar pertimbangan menyusun program kerja. Hal ini, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Pada periode 5 tahun pertama RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pengarusutamaan gender dinyatakan sebagai salah satu prinsip yang harus diaplikasikan pada semua program pembangunan, bersama dengan 2 pengarusutamaan lain, yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Namun demikian, pemahaman responsif gender sejauh ini, masih pada tahap bagaimana pemerintah daerah melibatkan perempuan dalam proyek pembangunan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, implementasi sampai evaluasi program. Faktanya, pemahaman gender mempunyai lingkup lebih luas daripada hanya sekedar perempuan. Gender mensyaratkan pemerintah daerah memfasilitasi kaum marjinal dan berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, orang tua/jompo dan kaum difabel. Dengan kata lain, gender berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan mereka dalam rencana teknis yang seharusnya diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemerintah Daerah wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sekitar 32 bidang, ada 15 bidang yang wajib memiliki SPM agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. 15 bidang yang sudah memiliki SPM antara lain Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, BKKBN, pangan, Perumahan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Urusan Dalam Negeri, Kesenian, Komunikasi dan informatika, penanaman modal, perhubungan, urusan sosial, dan tenaga kerja (Dinas Pekerjaan Umum, April 2012). Kebijakan Kemendagri dalam mendorong percepatan Penerapan SPM tertuang melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, mewajibkan penerapan SPM dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dwiyanto (2004) menyebutkan bahwa pelayanan publik membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, serta menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Di samping itu juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas tata kelola pemerintahan. Kenyataannya, pendekatan desain fasilitas umum, dilakukan dengan pendekatan rata-rata, menggeneralisasi kebutuhan tiap sarana, tanpa melihat siapa yang memanfaatkan fasilitas dan bagaimana pola aktivitas yang dilakukan. Ini mendorong perlunya ada upaya memetakan siapa saja aktor pengguna fasilitas umum perkotaan, tentunya tidak hanya melihat kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga melihat pada komposisi usia pengguna jasa fasilitas umum perkotaan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu penentuan variabel penelitian yang berdasarkan pada literatur terkait dan kemudian dilakukan komparasi di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data terstruktur. Survei dilakukan secara primer dan mengambil teknik observasi mendalam pada beberapa titik pengamatan yang telah ditentukan. Jumlah sarana prasarana lingkungan sebanyak enam jenis, dan disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 Tanggal: 18 Desember 2001, jenis sarana lingkungan perkotaan. Artikel ini berdasar pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tembalang Semarang, dan melakukan analisis khusus pada fasilitas umum yang terkait dengan bidang Permukiman dan Pekerjaan Umum, yaitu sarana lingkungan yang terdiri dari: sarana niaga, sarana pendidikan, sarana pelayanan umum, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau dan pemakaman dan sarana sosial budaya.

Kajian Literatur tentang Sarana Lingkungan Perkotaan Dan Perspektif Gender

Pengertian sarana lingkungan perkotaan

Sarana lingkungan perkotaan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang berfungsi sebagaimana mestinya dan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat sebagai pengguna sarana. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 Tanggal : 18 Desember 2001, jenis sarana lingkungan perkotaan ada enam macam, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Pelayanan Sarana Lingkungan Perkotaan

No	Jenis sarana	Indikator pelayanan
11	Sarana niaga	• Jangkauan pelayanan
22	Sarana pendidikan	• Tingkat pelayanan (unit/jiwa)
33	Sarana pelayanan umum (kantor polisi, terminal angkutan umum dll)	• Lokasi penyebaran
44	Sarana kesehatan	• Tingkat ketersediaan
55	Ruang terbuka hijau dan pemakaman	• Prosentase kebutuhan dari keseluruhan lahan yang tersedia
66	Sarana social budaya (tempat ibadah, perpustakaan)	

Sumber: Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 534/KPTS/M/2001 Tanggal: 18 Desember 2001

Dalam fungsi penyediaan sarana lingkungan oleh pemerintah, hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memastikan kecukupan sarana sesuai dengan kebutuhan penduduk. Kecukupan di sini mengandung dua pengertian, secara seimbang jumlah sarana yang dibutuhkan dan juga kualitas dari sarana yang dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka indikator pelayanan sarana juga ditentukan untuk memastikan fungsi distribusi barang dan adil dilakukan secara adil dan merata.

Pengertian responsif gender

Penelitian tentang gender, banyak menekankan pada aspek pembangunan sumber daya manusia (*capacity building*), dan tidak mengaitkan gender dalam penerapan kebutuhan, seperti implementasi gender dalam standarisasi fasilitas umum. Standarisasi dipilih sebagai tools, alat untuk dapat memahami gender adalah hal yang mutlak, dalam perencanaan kota terutama terkait sarana umum perkotaan, mengingat standarisasi menjamin efektivitas pelayanan, dan juga mampu meningkatkan kualitas hidup. Dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini, menggabungkan dua hal penting dalam penerapan perencanaan kota secara umum, yang merupakan gabungan perencanaan kebijakan untuk menciptakan kondisi lebih baik, dan penerapan model standarisasi menjadi instrument perencanaan yang menyangkut kebutuhan dasar penduduk perkotaan.

Gender adalah identifikasi untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh budaya, termasuk di dalamnya peran dan kewajiban untuk laki-laki dan perempuan, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, undang-undang, kebijakan, program dan lainnya sering memperkuat konstruksi budaya in. Peran gender adalah berkaitan dengan tugas, kegiatan pekerjaan yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat. (Rahardjo, 2001). Gender dipengaruhi oleh budaya, norma, agama / kepercayaan, gaya hidup dan kemajuan teknologi (Gerson (1985), Agarwal (1997), Shrestha (2000), Bartley (2005), Currie Maret (2010)). Gender adalah hal sentral dalam diskusi, dan masukan penting dalam setiap desain kebijakan/ program, khususnya yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan (Unterhalter, 2009).

Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat heterogen yang terdiri dari lebih dari 200 kelompok budaya yang terletak di 13.466 pulau, berbicara lebih dari 10 bahasa, dan memiliki setidaknya 5 agama/ keyakinan membuat perlu dilakukan

investigasi dengan melihat perspektif gender untuk mendorong keadilan dan keterwakilan dalam konteks pembangunan. Melihat karakteristik yang heterogen, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan apa gender. Gender dapat dilihat pada 2 aspek, berupa peran gender dan relasi gender, yang keduanya sangat dipengaruhi pada faktor individual yang melalui proses konstruksi sosial, pemahaman agama, tingkat pendidikan, dan teknologi.

Pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan masyarakat. Secara singkat, pengarusutamaan gender merupakan pendekatan yang mengintegrasikan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi kebijakan, program, proyek dan institusi pemerintah.

Konsep responsif gender adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat diperlakukan secara adil. Hal ini menginkat, pengarusutamaan gender dalam penyediaan sarana umum adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh aksesibilitas, kontrol, partisipasi dan manfaat dari penggunaan fasilitas umum. Beberapa Permasalahan Gender yang terkait dengan fasilitas umum, misalnya adalah (Tim PUG PU, Juli 2011)

- Kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai
- Kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA
- Terbaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan aset, lahan, rumah, terkait proses pengadaan tanah
- Kesenjangan Partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan & jembatan
- Kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi
- Adanya perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan
- Kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pembangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk laki-laki dan perempuan (contoh : Rest Area, Penyeberangan jalan di kawasan pertanian, *base camp*)
- Kurang terakomodasi program sarana dan prasarana perempuan dan kaum difabel dalam bangunan gedung/ perkantoran
- Kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan pada saat konsultasi publik

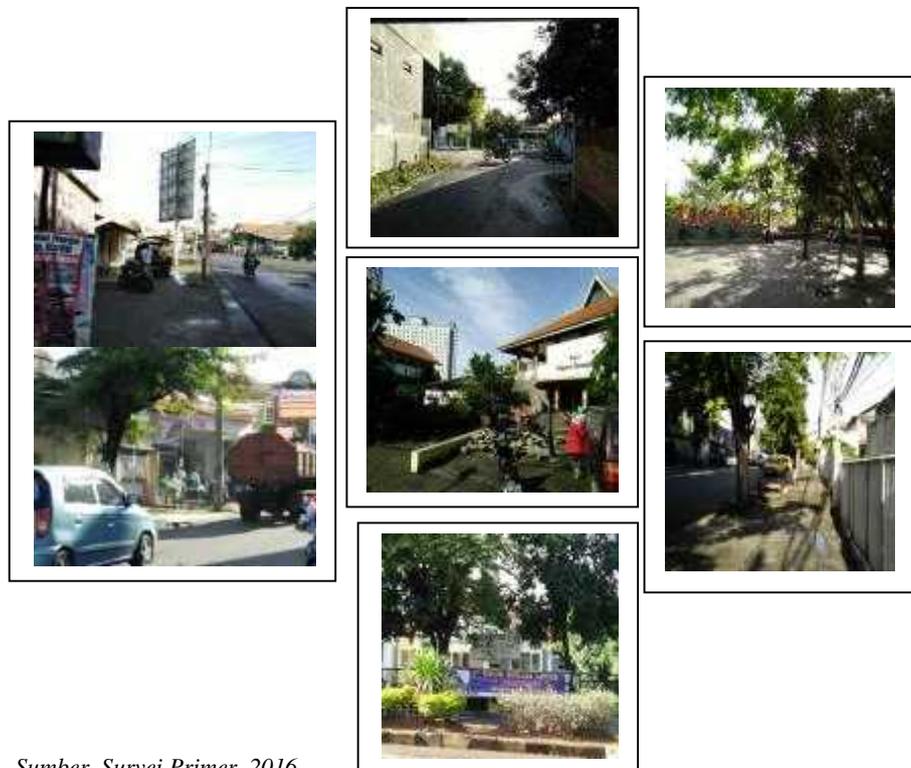
Sebagai kesimpulan, fungsi penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman pada dasarnya harus "*netral gender*" (tidak memihak salah satu jenis kelamin). Dengan kata lain, jika kepentingan gender dalam penyelenggaraan Infrastruktur PU dan Permukiman telah terpenuhi, maka telah responsif gender.

Dari sisi Administrasi Negara, pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan (Widyanto, 2005). Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup penuh tantangan, aparat pemerintah daerah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Atau dengan kata lain, pelayanan publik harus diberikan untuk menjamin kesejahteraan penduduknya.

Analisis Implementasi Responsif Gender Dalam Penyediaan Sarana Lingkungan

Bagi Indonesia, dengan heterogenitas wilayah dan penduduk, maka seharusnya pelayanan publik memenuhi standar pelayanan minimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 Tanggal : 18 Desember 2000, standar pelayanan minimal menjamin kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan, yang dihitung berdasarkan pedoman rata-rata pemanfaatan sarana prasarana dasar permukiman, berdasarkan prosentase unit dan jumlah jiwa. Nilai besaran SPM, menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan, dan selanjutnya akan menentukan road map tata kelola pemerintahan yang bersangkutan, apakah sudah dilaksanakan secara efektif atau belum.

Berikut akan dibahas satu persatu jenis sarana lingkungan perkotaan, apakah sudah menerapkan responsif gender pada wilayah Kecamatan Tembalang, Semarang. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan heterogenitas penduduk yang tinggal, baik sebagai penduduk asli maupun penduduk pendatang yang bersifat musiman, yaitu mahasiswa/i. Selain itu, dengan pencampuran nilai budaya dan norma yang berbeda antara penduduk asli dan pendatang, menjadikan lokasi penelitian lebih menarik untuk diteliti. Berdasarkan literatur yang telah diuraikan sebelumnya, analisis responsif gender akan fokus pada jumlah, kualitas dan jangkauan pelayanan sarana yang telah dipilih.



Sumber, Survei Primer, 2016

Gambar 1. Jenis sarana lingkungan di Kelurahan Tembalang

Keterangan gambar searah jarum jam: 1. Kantor kelurahan, 2. Taman aktif, 3. Pangkalan angkutan umum sementara, 4. Kantor polisi, 5. Masjid yang menyatu dengan lingkungan pendidikan dasar, 6. Sarana niaga lokal.

Uraian tabel 2. menggambarkan secara sekilas, jumlah jenis dan kualitas sarana lingkungan yang ada di Kecamatan Tembalang. Apabila dicermati dan dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dengan luas wilayah 268.23 hektar dan tingkat kepadatan penduduk 2.074 per km² serta rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang (BPS, 2016). Maka dapat dikatakan jumlahnya sudah mencukupi. Apalagi jumlah ini dihitung berdasarkan komposisi

jumlah penduduk permanen yang tinggal menetap di lokasi, bukan penduduk musiman yang sebagian besar adalah mahasiswa/pendatang.

Tabel 2. Kondisi Jumlah dan Pelayanan Sarana Lingkungan Kelurahan Tembalang

No	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi
1	Sarana niaga		Baik
	Toko	8	
	Kios	18	
	Warung	25	
	PKL	24	
2	Sarana pendidikan		
	TK	1	
	SD	1	
	Akademi	2	
	Perguruan Tinggi	1	
	Pondok Pesantren	1	
3	Sarana pelayanan umum		
	Kantor kelurahan	1	
	Balai kelurahan	1	
4	Sarana kesehatan		
	Posyandu	1	
	Puskesmas / Puskesmas Pembantu	0	
	Apotik	1	
	BKIA	1	
	Dokter praktek	1	
	Klinik kesehatan / 24 jam	1	
5	Ruang terbuka hijau dan pemakaman		
	Taman lingkungan	1	
	Pemukaman	1	
6	Sarana sosial budaya		
	Masjid	7	
	Mushola	5	
	Gereja	0	

Sumber : Monografi Kecamatan Tembalang 2011 dan modifikasi hasil survei 2016

Yang menjadi perhatian adalah pada kualitas dan jangkauan pelayanannya. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa lokasi pusat kegiatan sosial budaya, sarana pelayanan umum, ruang terbuka hijau dan pemakaman di pusat aktivitas warga. Setidaknya sejak awal berdirinya sarana sarana tersebut, difungsikan untuk mengikat aktivitas masyarakat di kelurahan dan balai pertemuan warga yang terletak di Jalan Sirajudin Tembalang. Untuk sarana perekonomian/ niaga lokasinya mengikat di sekitar permukiman warga, biasanya per Rukun Warga ada satu toko / warung. Namun perhitungan tersebut, belum menghitung secara signifikan pertumbuhan retail modern seperti alfamart dan indomart yang marak berkembang akhir-akhir ini. Selain itu, dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh sifat kekotaan wilayah Tembalang, sarana niaga seperti pusat perbelanjaan sayur mayur untuk Ibu Ibu sudah sangat *flexible (mobile)*. Yang penulis amati, sistem yang dilakukan adalah dengan cara jemput bola pada kebutuhan ibu rumah tangga, khususnya di kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang swasta. Dapat dilihat pada gambar sarana diatas, bahwa tukang sayur dapat berupa mobil box, gerobak sayur ataupun motor penjual sayur.

Mengingat fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, maka sudah selayaknya apabila ada beberapa jenis sarana yang dibutuhkan di kawasan Tembalang, seperti sarana laundry, fotokopi, cuci motor, warung makan dan lain lain. Selain itu juga perlu mempertimbangkan jangkauan pelayanan, bahwa preferensi masyarakat adalah mencari pelayanan dengan kualitas terbaik. Artinya, tidak seharusnya jumlah sarana dihitung dengan membandingkan komposisi penduduk dan luas lahan terbangun saja. Namun juga perlu dilihat jumlah dan keberadaan sarana yang sama di kelurahan lain di kecamatan Tembalang. Selain juga perlu melihat karakteristik aktivitas dominan yang sudah disebutkan sebelumnya. Faktanya, tambahan sarana pendukung yang dibutuhkan di kawasan Tembalang sebagai kawasan pendidikan, tidak terekam dalam data monografi Kecamatan yang dikeluarkan tiap 5 tahun.

Kesimpulan

Kebutuhan sarana lingkungan di Kelurahan Tembalang berdasarkan hasil analisis sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Hanyasaya, dalam perkembangannya, mengingat pesatnya pertumbuhan aktivitas penduduk musiman dan aktivitas ikutan lainnya, maka jumlah dan indikator pelayanan perlu ditambahkan. Yang perlu ditambahkan adalah: Jangkauan pelayanan, Pengguna usia produktif tidak produktif, kondisi tata guna lahan dan pemetaan aktivitas.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2012. *Buku 5 : Gender dalam Perencanaan dan Pembangunan Nasional*.
- Beall, J & Todes, A 2004, 'Gender and integrated area development projects: lessons from Cato Manor, Durban', *Cities*, vol.2, no.4, pp.301–310.
- Beall, J, 1996. n.d. *Urban governance: why gender matters*. Available from : www.cities-localgovernments.org/.../urbangovernance,whygendermatters. [20 March 2013]
- Beard, V. A. 2002, 'Covert planning for social transformation in Indonesia', *Journal of Planning Education and Research*, vol.22, no.1, pp.15–25.
- Blind K & Jungmittag A, "The Impact of Patents and Standards on Macroeconomic Growth: A Panel Approach Covering Four Countries and 12 Sectors". *Journal of Productivity Analysis*, Springer, vol. 29(1), pages 51-60, February 2008.
- BPS. 2016. *Kecamatan Tembalang Dalam Angka 2016*.
- BSN Report, "Kajian Penggunaan dan Pertumbuhan SNI di Indonesia", BSN Jakarta, 2009.
- BSN Team, 'SNI Penguat Daya Saing Bangsa' Badan Standardisasi Nasional, Jakarta 2011.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, JICA-Gajah MADA University Press, Yogyakarta.
- Haus, M, & Erling Klausen, J 2011, 'Urban leadership and community involvement: ingredients for good governance?', *Urban Affairs Review*, vol.47, no.2, pp.256–279.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 Tanggal : 18 Desember 2001 tentang jenis sarana lingkungan perkotaan.
- Myers, D. 1988. "Building Knowledge about Quality of Life for Urban Planning." *Journal of the American Planning Association* 54(3).